

**KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Akmal Muallif¹, Abdul Jabbar², Haeruiddin Syarifuddin³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: akmalqrzt@gmail.com

Email: jbr.nyonk1@umsrappang.ac.id; heru.stisip@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the performance of local governments in poverty alleviation programs in Baranti sub-district, Sidenreng Rappang district. The research method used is a qualitative descriptive research method. Data sources are taken from observations, interviews and documents. Data collection was carried out through in-depth interviews with the community and government officials of Baranti sub-district. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data obtained were then processed using Nvivo 12 plus. The results of the study indicate that local governments have implemented various programs to reduce poverty rates, such as community economic empowerment, social assistance, education, health and infrastructure development. We can see that service products and completion times show the highest presentation of the five indicators which are then followed by the competence of officers who are quite good. However, the government still has challenges in terms of the facilities and infrastructure provided are still very minimal and service procedures that need to be improved, especially in terms of evaluation and supervision of related policies.

Keywords: Poverty alleviation, performance, local government.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam program pengentasan kemiskinan di kecamatan Baranti kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diambil dari observasi, wawancara dan dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada masyarakat dan aparat pemerintah kecamatan Baranti. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan Nvivo 12 plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai program untuk mengurangi angka kemiskinan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan pengembangan infrastruktur. Dapat kita lihat bahwa produk pelayanan dan waktu penyelesaian menunjukkan presentasi tertinggi dari kelima indikator yang kemudian disusul oleh kompetensi petugas yang sudah cukup baik, Namun, pemerintah masih memiliki tantangan dalam hal sarana dan prasarana yang disediakan masih sangat minim serta prosedur pelayanan yang perlu ditingkatkan terutama dalam hal evaluasi dan pengawasan kebijakan terkait.

Kata Kunci: Pengentasan kemiskinan, kinerja, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten merupakan salah satu unit pemerintahan di tingkat regional di Indonesia. Fokus utamanya adalah pada pengelolaan administratif, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta memberikan layanan yang merata kepada

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

masyarakat di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian penting. Di puncaknya terdapat Kepala Daerah atau Bupati yang merupakan pemimpin eksekutif di tingkat kabupaten. Bupati dibantu oleh Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, terdapat juga DPRD Kabupaten sebagai lembaga legislatif yang bertanggung jawab dalam membuat peraturan daerah dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Salah satu fungsi utama dari Pemerintah Kabupaten adalah pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya. Ini meliputi pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, keamanan, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.

Pemerintah Kabupaten juga memiliki peran penting dalam pembangunan wilayahnya. Mereka merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi daerah. Hal ini bisa mencakup pembangunan jalan, pemenuhan kebutuhan air bersih, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Mereka harus memastikan bahwa layanan-layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, dan keamanan tersedia dan dapat diakses dengan baik oleh seluruh warga di wilayahnya. Peningkatan efisiensi dan kualitas layanan publik menjadi fokus untuk memastikan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten juga bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta lembaga dan instansi lainnya untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Kerja sama lintas sektor dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah. Dalam menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, kemiskinan, ketimpangan, dan masalah-masalah sosial lainnya, Pemerintah Kabupaten terus berupaya untuk mencari solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Mereka mengadaptasi kebijakan-kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakatnya serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Dengan menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien, mereka berperan dalam menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah kabupaten memiliki peran krusial dalam struktur pemerintahan di tingkat lokal di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kewenangan pemerintah kabupaten ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan memberikan cakupan luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah kabupaten juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial masyarakatnya (Ferezegia, 2018). Mereka mendukung kegiatan sosial, menjaga keberagaman budaya, dan mempromosikan seni serta kebudayaan lokal.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah kabupaten harus berkoordinasi dengan stake holder lokal, termasuk lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat di wilayahnya. Kewenangan pemerintah kabupaten mencerminkan otonomi daerah yang diberikan oleh negara, dengan harapan bahwa pemerintah lokal dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat di tingkat lokal. Otonomi daerah merupakan konsep yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayahnya sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pasal 1 Ayat 6 UUD No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Pemberian otonomi daerah memiliki implikasi yang signifikan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan mereka dapat lebih responsif

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

terhadap kebutuhan dan potensi lokal dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini memungkinkan adanya kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, otonomi daerah juga memungkinkan terciptanya inovasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki tantangan dan potensi yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan, sehingga diperlukan pendekatan yang beragam dan disesuaikan dengan konteks lokal. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengeksplorasi solusi-solusi kreatif dan berbasis lokal dalam mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, implementasi otonomi daerah dalam mengentaskan kemiskinan juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah masalah kapasitas dan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah yang belum merata. Beberapa daerah mungkin menghadapi kendala dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknis.

Selain itu, koordinasi antarlembaga dan tingkat pemerintahan seringkali menjadi hambatan dalam upaya mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program untuk mengentaskan kemiskinan secara holistik. Koordinasi yang kurang efektif dapat menyebabkan tumpang tindih program, pemborosan sumber daya, dan ketidakpastian dalam pencapaian target pengentasan kemiskinan (Aisyah et al., 2023). Meskipun demikian, otonomi daerah tetap menjadi landasan penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan tercipta sinergi antara kebijakan nasional dan lokal dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan semangat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan, termasuk dalam upaya mengatasi kemiskinan.

Pemerintah daerah memiliki peran yang krusial dalam upaya mengentaskan kemiskinan di suatu negara. Dengan kewenangan yang dimilikinya dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan di tingkat lokal, pemerintah daerah dapat menjadi ujung tombak dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui berbagai strategi dan langkah konkret, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dan distributif.

Salah satu langkah utama yang dapat diambil oleh pemerintah daerah adalah menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, pendidikan yang berkualitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan menciptakan lapangan kerja yang cukup dan berkualitas, pemerintah daerah dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga secara bertahap mengurangi tingkat kemiskinan (Anisa & Syafril, 2024).

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menyediakan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak. Dengan meningkatkan akses terhadap layanan-layanan tersebut, pemerintah daerah dapat membantu masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, karena mereka dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu strategi yang penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pemerintah daerah dapat memainkan peran yang aktif dalam memberdayakan masyarakat melalui berbagai program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta penyediaan akses terhadap pasar bagi produk-produk lokal. Dengan meningkatkan keterampilan dan kapasitas ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dapat membantu mereka untuk mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Pemerintah daerah juga dapat berperan dalam mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan membangun kemitraan yang kuat antara berbagai pihak, pemerintah daerah dapat memperluas jangkauan dan dampak dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan (Papilaya, 2020). Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua kebijakan dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat tercermin dengan baik dalam berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan.

Kinerja pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan sangatlah penting. Melalui berbagai strategi dan langkah konkret, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dan distributif, menyediakan akses terhadap layanan dasar, memberdayakan masyarakat, mengkoordinasikan berbagai program, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjadi garda terdepan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2019	14.44
2020	15.36
2021	15.25
2022	15.56
2023	15.75

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 tentang jumlah penduduk miskin tahun 2019 sebanyak 14,44 ribu jiwa, tahun 2020 sebanyak 15.36 ribu jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 15,25 ribu jiwa, tahun 2022 sebanyak 15,56 ribu jiwa, dan pada tahun 2023 sebanyak 15,75 ribu jiwa. Ini menandakan bahwa Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang belum mampu mengendalikan atau menekan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan rendah, upah yang rendah serta kurangnya lapangan Kerja.

Penelitian ini menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana keberhasilan program-program yang telah diimplementasikan. Kedua, dengan memahami persepsi dan kepuasan masyarakat, pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan dan program mereka agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Ketiga, penelitian ini juga dapat memberikan masukan yang berharga bagi peneliti, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah dalam program pengentasan kemiskinan menjadi sebuah topik penelitian yang relevan dan memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengurangi tingkat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

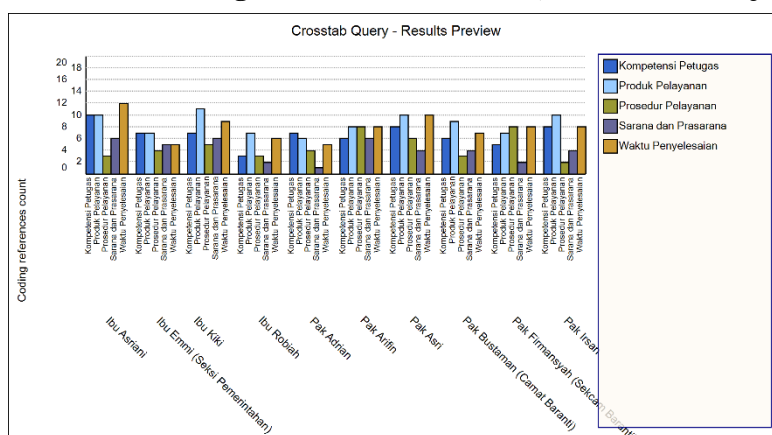
METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 10 (sepuluh) orang yakni masyarakat dan aparat pemerintah kecamatan Baranti. Identifikasi informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Penggunaan purposive sampling harus konsisten dengan tujuan penelitian berdasarkan tipe partisipan yang sesuai dengan keinginan peneliti untuk keperluan penelitian, menggunakan purposive sampling peneliti harus mengidentifikasi dan memilih informasi informan yang mengetahui dan pahami fokus terkait dengan fenomena yang diteliti. Kriteria yang dimaksud adalah masyarakat dan aparat pemerintah kecamatan Baranti. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian dokumen. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus.

PEMBAHASAN

Penilaian Kinerja

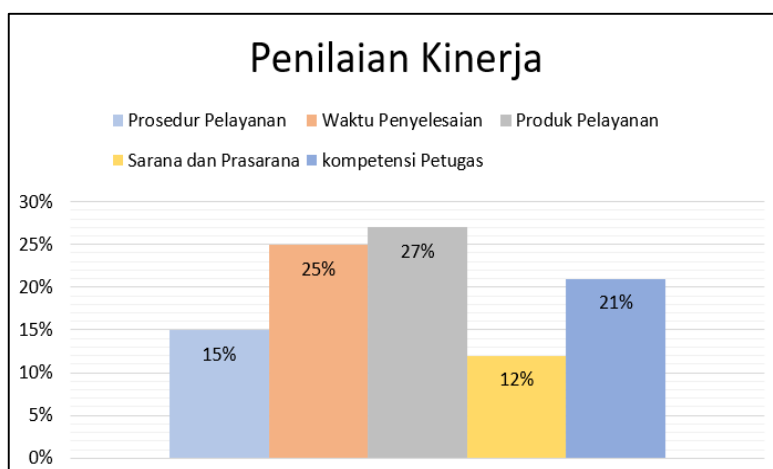
Gambar 1: Diagram Validasi Informan, Penilaian Kinerja



Sumber :Hasil Analisis Nvivo 12 plus, 2024

Hasil analisis dari penilaian kinerja terlihat jelas bahwa produk pelayanan dan waktu penyelesaian menunjukkan presentasi tertinggi dari kelima indikator yang kemudian disusul oleh kompetensi petugas yang sudah cukup baik, Namun, pemerintah masih memiliki tantangan dalam hal sarana dan prasarana yang disediakan masih sangat minim serta prosedur pelayanan yang perlu ditingkatkan terutama dalam hal evaluasi dan pengawasan kebijakan terkait.

Gambar 2: Diagram Validasi Indikator, Penilaian Kinerja



Dari indikator penilaian kinerja terlihat jelas produk pelayanan menjadi indikator yang paling dominan dari informan dalam kinerja pemerintah daerah dalam program pengentasan kemiskinan di kecamatan Baranti kabupaten Sidenreng Rappang dengan persentase mencapai 27%, waktu penyelesaian memiliki persentase keseluruhan mencapai 25%, kompetensi petugas memiliki persentase keseluruhan mencapai 21%, sedangkan prosedur pelayanan memiliki persentase keseluruhan mencapai 15%, kemudian indikator yang memiliki persentase terendah yaitu sarana dan prasarana dengan persentase 12%.

Berdasarkan Kep. MENPAN No. 63 Tahun 2003 yakni prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, produk pelayanan, sarana dan prasarana dan kompetensi petugas. Hasil analisis penilaian kinerja pemerintah daerah dalam program pengentasan kemiskinan di kecamatan Baranti kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan dalam kinerja pemerintah pada program pengentasan kemiskinan berperan penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi bantuan yang disalurkan. Prosedur ini meliputi langkah-langkah sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dengan cara yang adil dan transparan.

Langkah awal dalam prosedur pelayanan adalah identifikasi dan penilaian kebutuhan. Pemerintah harus mengumpulkan data yang akurat tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang menjadi target program. Proses ini biasanya melibatkan survei dan wawancara untuk memperoleh informasi tentang pendapatan, status pekerjaan, kesehatan, dan faktor lain yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Data yang dikumpulkan harus diproses dengan hati-hati untuk menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Penetapan kriteria kelayakan merupakan langkah krusial. Pemerintah perlu menetapkan kriteria yang jelas dan objektif untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Kriteria ini sering kali didasarkan pada tingkat kemiskinan yang diukur melalui indikator seperti pendapatan di bawah garis kemiskinan, kepemilikan aset, dan kondisi hidup yang memprihatinkan. Penetapan kriteria yang tepat membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Pengajuan dan verifikasi data adalah bagian penting dari prosedur pelayanan. Setelah kriteria kelayakan ditetapkan, individu atau keluarga yang memenuhi syarat harus mengajukan permohonan dengan menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan. Verifikasi data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat dan lengkap. Proses verifikasi yang efektif

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

penting untuk mencegah penipuan dan memastikan bahwa bantuan tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak.

Distribusi bantuan adalah tahapan berikutnya dalam prosedur pelayanan. Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan disalurkan secara adil dan tepat waktu. Ini melibatkan pemilihan metode distribusi yang paling sesuai, seperti transfer tunai, penyediaan barang kebutuhan, atau layanan langsung. Proses distribusi harus dilakukan dengan cara yang efisien dan aman, untuk memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan penerima dengan minimnya hambatan.

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam menilai kinerja pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Monitoring berkelanjutan diperlukan untuk memantau implementasi program dan memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Evaluasi dilakukan untuk menilai dampak program, mengidentifikasi keberhasilan, serta mengatasi masalah yang mungkin timbul (Setiawan & Jamaliah, 2023). Hasil dari evaluasi memberikan umpan balik yang berharga untuk memperbaiki dan menyempurnakan program di masa depan.

Transparansi dan akuntabilitas juga harus dijaga dalam setiap langkah prosedur pelayanan. Transparansi dalam proses pengelolaan dan distribusi bantuan membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan dan audit yang efektif mendukung akuntabilitas, mengurangi risiko korupsi, dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan program.

Prosedur pelayanan yang efektif memainkan peran vital dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Dengan menerapkan langkah-langkah sistematis untuk identifikasi, penetapan kriteria, verifikasi, distribusi, monitoring, dan evaluasi, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat miskin dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan.

2. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian dalam program pengentasan kemiskinan berperan krusial dalam menentukan efektivitas dan dampak dari bantuan yang diberikan. Efisiensi dalam setiap tahap mulai dari pengumpulan data, penetapan kriteria kelayakan, pengajuan dan verifikasi permohonan, hingga distribusi bantuan dan evaluasi sangat mempengaruhi sejauh mana program dapat memenuhi tujuannya. Pengumpulan data yang cepat dan akurat memungkinkan identifikasi penerima bantuan yang tepat waktu, sementara penetapan kriteria kelayakan yang efisien menghindari penundaan dalam seleksi. Proses verifikasi yang efisien mencegah penundaan distribusi dan mengurangi kemungkinan kesalahan, sedangkan distribusi bantuan yang tepat waktu memastikan manfaat program tercapai sesuai rencana. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara tepat waktu memungkinkan identifikasi dan perbaikan masalah dengan cepat, meningkatkan kinerja program secara keseluruhan. Dengan manajemen waktu yang efektif, program pengentasan kemiskinan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat aliran bantuan, dan memaksimalkan dampaknya pada masyarakat miskin.

3. Produk Pelayanan

Produk pelayanan dalam program pengentasan kemiskinan mencakup berbagai jenis bantuan dan layanan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Produk ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, serta memberdayakan individu dan komunitas untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Salah satu bentuk produk pelayanan yang paling langsung adalah bantuan tunai. Bantuan tunai memberikan dukungan finansial langsung kepada keluarga miskin, memungkinkan mereka untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan. Program ini

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada penerima bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, serta memberikan dampak cepat dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Selain bantuan tunai, bantuan barang juga merupakan produk pelayanan yang signifikan. Ini termasuk distribusi barang-barang kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga. Bantuan barang dirancang untuk membantu masyarakat miskin dengan kebutuhan mendesak, mengurangi beban ekonomi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Produk ini sering kali disalurkan melalui pos-pos distribusi yang dikelola pemerintah atau lembaga kemanusiaan.

Program kesehatan adalah produk pelayanan penting lainnya yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ini mencakup penyediaan layanan medis gratis atau dengan biaya rendah, termasuk vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, dan perawatan penyakit. Selain itu, program kesehatan sering kali menyediakan edukasi tentang kesehatan dan gizi, membantu masyarakat memahami dan mengatasi masalah kesehatan yang umum di kalangan populasi miskin.

Program pendidikan juga merupakan aspek krusial dari produk pelayanan dalam pengentasan kemiskinan. Program ini meliputi beasiswa, bantuan sekolah, serta pelatihan dan kursus keterampilan untuk anak-anak dan orang dewasa. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik, program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, membuka peluang kerja yang lebih baik, dan memberdayakan individu untuk mencapai kemerdekaan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur adalah produk pelayanan lain yang penting, mencakup perbaikan dan pembangunan fasilitas dasar seperti sanitasi, akses air bersih, dan perumahan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi hidup secara keseluruhan, mengurangi risiko kesehatan, dan menyediakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan masyarakat (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi juga termasuk dalam produk pelayanan. Ini bisa berupa program pelatihan kerja, akses ke kredit mikro, dan dukungan untuk usaha kecil. Dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan finansial, program ini membantu individu untuk memulai dan mengelola usaha mereka sendiri, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Produk pelayanan dalam program pengentasan kemiskinan dirancang untuk menangani berbagai aspek kemiskinan dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan menyediakan bantuan tunai, barang, layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, program ini berusaha untuk memberikan dukungan yang holistik dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak tetapi juga berupaya membangun fondasi yang kuat untuk kemandirian dan kesejahteraan jangka panjang.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam program pengentasan kemiskinan sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas serta jangkauan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Sarana mencakup berbagai fasilitas, peralatan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, sedangkan prasarana meliputi infrastruktur dasar yang esensial untuk memfasilitasi akses dan distribusi bantuan.

Sarana mencakup fasilitas dan alat yang mendukung operasional program, termasuk pusat layanan, kantor distribusi, dan ruang penyimpanan untuk barang bantuan seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga. Sarana juga melibatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen data untuk memproses aplikasi, memantau distribusi, serta mengevaluasi program. Sistem ini membantu dalam pengelolaan yang efisien dan transparan, serta memperlancar komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat.

Prasarana meliputi infrastruktur dasar yang mendukung program pengentasan kemiskinan, seperti

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

pembangunan dan perbaikan fasilitas sanitasi, penyediaan air bersih, dan perumahan. Infrastruktur ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Contohnya, pembangunan sistem pembuangan limbah dan akses air bersih dapat mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kesehatan umum.

Selain itu, prasarana juga mencakup pengembangan infrastruktur transportasi, seperti jalan dan jembatan, yang mempermudah akses ke layanan dan distribusi bantuan. Infrastruktur transportasi yang baik memastikan bantuan dapat sampai ke daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau dengan lebih efisien, mengurangi keterlambatan distribusi, dan meningkatkan aksesibilitas program.

Fasilitas kesehatan dan pendidikan juga termasuk dalam prasarana penting untuk pengentasan kemiskinan. Rumah sakit, klinik, sekolah, dan pusat pelatihan menyediakan layanan vital bagi masyarakat miskin, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Penyediaan fasilitas ini membantu dalam meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, dan membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang.

Sarana dan prasarana sangat penting untuk keberhasilan program pengentasan kemiskinan, karena mereka memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan dengan efektif dan efisien. Dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, program ini dapat lebih baik mencapai tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

5. Kompetensi Petugas

Kompetensi petugas dalam program pengentasan kemiskinan adalah elemen krusial yang mempengaruhi sukses dan dampak dari program tersebut. Petugas yang terampil dapat memastikan bahwa bantuan diberikan secara efisien dan tepat sasaran serta bahwa seluruh prosedur dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi ini mencakup berbagai aspek, dari pengetahuan teknis hingga keterampilan interpersonal, yang semuanya berkontribusi pada keberhasilan program.

Petugas perlu memiliki pengetahuan teknis yang mendalam mengenai program pengentasan kemiskinan serta kebijakan yang berkaitan. Mereka harus memahami dengan jelas tujuan program, jenis bantuan yang disediakan, dan mekanisme distribusinya. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang aturan dan prosedur administrasi yang berlaku, serta penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen data. Keahlian ini memungkinkan petugas untuk mengelola data penerima bantuan dengan tepat, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara akurat, dan melakukan evaluasi program yang efektif.

Selain pengetahuan teknis, petugas juga memerlukan keterampilan manajerial yang baik. Ini melibatkan kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasi, dan mengawasi berbagai kegiatan dalam program. Keterampilan manajerial penting untuk mengkoordinasikan berbagai pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal. Petugas harus mampu mengelola anggaran, memantau pelaksanaan program, dan mengatasi masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan. Keterampilan ini juga membantu dalam memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan.

Keterampilan komunikasi juga merupakan aspek penting dari kompetensi petugas. Mereka harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, termasuk penerima bantuan, masyarakat, dan kolega. Kemampuan ini mencakup komunikasi verbal dan keterampilan dalam penulisan laporan serta dokumentasi. Komunikasi yang efektif membantu dalam menyampaikan informasi tentang program kepada masyarakat, menangani keluhan, dan memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka.

Keterampilan interpersonal dan empati juga sangat penting dalam konteks ini. Petugas perlu berinteraksi dengan masyarakat miskin dengan cara yang sensitif dan penuh perhatian. Memahami kondisi sosial dan ekonomi penerima bantuan serta menunjukkan empati terhadap situasi mereka

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

membantu membangun kepercayaan dan mengurangi potensi konflik. Keterampilan interpersonal juga mendukung petugas dalam bekerja sama dengan berbagai pihak dan membangun hubungan positif dengan masyarakat.

Kemampuan analisis dan pemecahan masalah adalah keterampilan tambahan yang diperlukan. Petugas harus mampu menganalisis data dan informasi untuk membuat keputusan yang tepat tentang distribusi bantuan dan penyesuaian program. Kemampuan ini penting untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program serta untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari program dengan efektif.

Kompetensi petugas dalam program pengentasan kemiskinan sangat menentukan keberhasilan program. Dengan pengetahuan teknis yang kuat, keterampilan manajerial dan komunikasi yang baik, serta kemampuan interpersonal dan analisis yang efektif, petugas dapat menjalankan program dengan efisien dan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas adalah kunci untuk meningkatkan kinerja program dan mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai program untuk mengurangi angka kemiskinan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan pengembangan infrastruktur. Dapat kita lihat bahwa produk pelayanan dan waktu penyelesaian menunjukkan presentasi tertinggi dari kelima indikator yang kemudian disusul oleh kompetensi petugas yang sudah cukup baik, Namun, pemerintah masih memiliki tantangan dalam hal sarana dan prasarana yang disediakan masih sangat minim serta prosedur pelayanan yang perlu ditingkatkan terutama dalam hal evaluasi dan pengawasan kebijakan terkait.

REFERENSI

- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif Dari Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(12), 3722–3736. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1065>
- Anisa, E., & Syafril, R. (2024). Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Struktural di Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 15(1), 164. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v15i1.76666>
- Ferezegia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(1), 1–6. <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Papilaya, J. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.1113>
- Setiawan, I., & Jamaliah, J. (2023). Analisis Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia. *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, 2(5), 399–405. <https://doi.org/10.54543/etnik.v2i5.188>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id